

**PENETAPAN PEMBAGIAN WARIS KEPADA TRASGENDER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh :

**AMAR DAULANA
I000160144**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENETAPAN PEMBAGIAN WARIS KEPADA TRASGENDER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

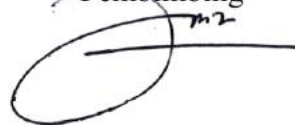
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

AMAR DAULANA
I000160144

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

Yayuli, S.Ag., M.P.I

NIDN : 0612056404

HALAMAN PENGESAHAN




**PENETAPAN PEMBAGIAN WARIS KEPADA TRASGENDER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

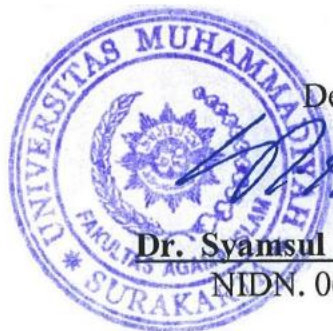
OLEH
AMAR DAULANA
I000160144

Telah dipertahankan di depan dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Rabu, 18 November 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Yayuli, S.Ag., M.P.I
(Ketua Dewan Penguji)
2. Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Harun, M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()



Dekan


Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.
NIDN. 0605096402

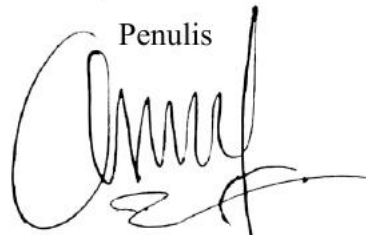
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 November 2020

Penulis



AMAR DAULANA

I000160144

PENETAPAN PEMBAGIAN WARIS KEPADA TRASGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abstrak

Isu transgender sangat marak dalam kehidupan masyarakat saat ini dengan operasi ganti kelamin demi menjadi laki-laki atau perempuan sesungguhnya. Hal ini masih dianggap tabu, karena dianggap menyalahi kodrat dan bertentangan dengan nilai agama Islam, Islam hanya mengatur pembagian waris untuk laki-laki dan perempuan tidak mengatur waris untuk transgender. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan transgender dan untuk mengkaji penyelesaian pembagian transgender dalam waris menurut hukum Islam jenis penelitian adalah library research pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif teknik pengumpulan datanya melalui library research dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan waris transgender dalam hukum Islam akan mendapatkan sesuai dengan jenis kelamin sebelum ia melakukan operasi jika operasi dilakukan tanpa kecacatan, berbeda dengan transgender yang dikarenakan adanya kecacatan dalam dirinya akan ditentukan sesuai ketentuan hasil medis. Ketetapan bagian waris untuk transgender dilakukan dengan menentukan jenis kelamin dari seorang transgender tersebut, untuk menentukan jenis kelamin seorang transgender dapat dilakukan dengan menggunakan hasil medis maupun dengan menggunakan jenis kelamin semula sebelum melakukan operasi.

Kata Kunci: waris, transgender, hukum, islam.

Abstract

The issue of transgender is very widespread in people's lives today with sex-change operations for the sake of being a real man or woman. This is still considered taboo, because it is considered to violate the nature and contrary to the values of the Islamic religion, Islam only regulates the distribution of inheritance for men and women does not apply inheritance for transvestites. This study aims to describe the position of transgender and to examine the allocation of transgender in inheritance according to Islamic law. This type of research is library research used is a method that uses normative data merging techniques through library research and try with qualitative methods. The results of this study indicate that the position of the transgender heir in Islamic law will be in accordance with the sex before he performs operations performed without disabilities, in contrast to transgender which causes differences in disability in him will be in accordance with medical results. The determination of the inheritance for transgender is done by determining the sex of the transgender, to determine the sex of a transgender can be done using medical results or by using the original sex before performing surgery.

Keywords: inheritance, transgender, law, islam.

1. PENDAHULUAN

Pada umumnya, usaha untuk memperoleh identitas jenis kelamin merupakan proses yang lancar dan bebas dari kesulitan. Manusia dikelompokkan sebagai pria dan wanita

waktu lahir diperlakukan sebagaimana anak laki-laki dan perempuan oleh orang tua dan dengan mudah mempelajari jenis kelamin ketika dewasa. Namun sejumlah kecil orang, usaha untuk mengembangkan identitas jenis kelamin merupakan suatu masalah. Yang dimaksudkan adalah berkelamin ganda (*Ambiguous Genitalia*).

Di Indonesia, hukum tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan di Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan yang berkenaan dengan harta warisan dan hal tersebut telah dituangkan dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Namun permasalahan yang sedang menjadi wacana pemikiran para ulama saat ini, tentang kewarisan bagi *Transgender*. Fenomena yang menjulang pada saat ini ketika seseorang itu merasa tidak puas dengan kelamin yang dimilikinya sehingga mereka berpikir bahwa melakukan operasi kelamin sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Sejak sepuluh tahun terakhir kata *gender* telah menyebarluas di lingkungan masyarakat kita dan hal ini telah memasuki di perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan era pembangunan dunia ketiga. Begitu juga dengan Indonesia hampir setiap pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah membahas mengenai masalah *gender*

Istilah *Transgender* muncul belakangan ini dikenal dengan (*Transgender People*): *some use transgender/ transgender people as a synonym for transsexual or to refer to person medically diagnosed with gender dysphoria*. Sinonim dari transgender adalah transeksual atau jika merujuk kepada ahli medis yang didiagnosis dengan *dysphoria gender*.

Transgender adalah mereka yang mengidentifikasi atau mengeksperisikan diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan atau mereka yang lahir dengan kelamin biologis ambigu. Adapun istilah *Transeksual* sering dipahami masyarakat sebagai kelamin ganda dalam dunia medis istilah ini dikenal dengan *Ambiguous Genitalia* artinya kelamin yang meragukan. Untuk kasus operasi penggantian kelamin bagi yang memiliki alat kelamin ganda, kebanyakan orang menganggap itu sah-sah saja dan para ulama pun membolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum *syar'i* terkait penyempurnaan tersebut.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen. Penulis menggunakan penelitian ini karena akan menghasilkan informasi mengenai pengamatan dari data-data tertulis maupun dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang kewarisan transgender.

Metode pendekatan ini adalah metode pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku). Penulis menggunakan pendekatan normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kewarisan bagi transgender menurut perspektif hukum Islam sebagai salah satu hukum yang berlaku di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Kedudukan hukum dari operasi pergantian kelamin kelompok transeksual atau *transgender*. Dalam dunia kedokteran modern sendiri, dikenal tiga bentuk operasi atau *transgender* kelamin yakni:

Operasi pergantian kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal, MUI mengharamkan dalam musyawarah nasional II Tahun 1980 tentang operasi kelamin. Pertama, masalah seseorang yang terlahir dalam kondisi sempurna organ kelaminnya laki-laki memiliki kelamin yang laki-laki secara sempurna dan perempuan yang memiliki alat kelamin perempuan secara sempurna dan bisa berfungsi sebagaimana mestinya, bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium, jika orang ini melakukan perpindahan kelamin atau operasi kelamin/*transgender* dengan alasan tidak puas dengan kelamin yang dimilikinya atau karena tidak adanya kecocokan terhadap gender yang dimilikinya, dalam ibadah waris dan status gendernya tetap berpatokan dengan hukum jenis kelaminnya semula sebelum diubah.

Penjelasan kaidah ini sudah jelas bahwa jika seseorang yang memiliki kelamin normal itu hukumnya tetap kembali dengan kelamin semula baik segi hukum ibadah

muamalah bahkan kewarisannya itu tetap kembali dengan kelamin sebelum ia melakukan operasi kelamin atau lazim disebut dengan *transgender*.

Para ulama fiqh mendasarkan hukum tersebut dengan firman Allah Q.S Al-hujurat ayat 13 tentang :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat ini menjelaskan tentang *equality* (keadilan) sekaligus mengajarkan prinsip *equality* (keadilan) bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya yang telah ditentukan baik sebagai laki-laki maupun perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang yang melakukan operasi kelamin atau lazimnya disebut dengan *transgender* ini tetap kembali dengan kelamin awal sebelum ia melakukan operasi. karena Allah telah menciptakan manusia dengan kelamin normal tetapi dengan bermacam alasan sehingga masih banyak orang yang melakukan operasi kelamin. Tetapi operasi ini bukan berarti mereka terlepas dari hukum yang ada karena dari segi ibadah muamalah dan kewarisan seseorang yang memiliki kelamin normal akan tetap diperlakukan seperti kelamin semula dari berbagai hukum yang telah ditetapkan. Jadi, apapun bentuk kelamin setelah melakukan operasi atau *transgender* ini maka kelamin yang berlaku untuk kewarisannya atau pun ibadah lainnya tetap berpatokan dengan kelamin semula sebelum melakukan operasi.

Oleh karena itu secara tegas hal ini diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin atau *transgender*. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula, namun kedudukan kewarisannya serta

ibadah lainnya tetap kembali dengan kelamin semula sebelum melakukan operasi kelamin atau *transgender*.

Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin seperti alat kelamin yang tidak berlubang atau tidak sempurna, sehingga sangat dibutuhkan kejelasan dari kelamin yang dimilikinya dalam hal ini Islam menganjurkan untuk memperjelas kelamin yang dimilikinya. Hukum dari penyempurnaan kelamin ini hukumnya dibolehkan bahkan dianjurkan.

Sesuai qaidah fiqh yang menjelaskan bahwa “kemudharatan itu harus dihilangkan”.

زالا ضرري

Kedua, operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *tahmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan pergantian jenis kelamin ini dibolehkan menurut hukum syariat. Apabila kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik dari alat kelamin laki-laki maupun alat kelamin perempuan, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Hal ini berpatokan bahwa jika kelamin ini tidak memiliki kejelasan akan mengandung kemafsadatan operasi bagi seseorang yang mengalaminya sesuai dengan kaidahnya bahwa kemudharatan akan dihilangkan. Hal ini diperbolehkan melakukan operasi kelamin bahkan dianjurkan untuk memperjelas kelamin seseorang.

Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ jenis kelamin. *Ketiga*, operasi yang dilakukan kepada seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan oleh syariat keberadaan alat kelamin laki-laki (*dzhakar*) yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan

kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.

Oleh karena itu pembuangan salah satu alat kelamin ini dianjurkan oleh syariat karena akan memilih alat kelamin yang paling dominan dengan tanda-tanda yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Hal ini akan berbahaya jika seseorang hidup dalam keadaan dua alat kelamin yang berfungsi secara bersamaan. Apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalamnya adanya rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya untuk memfungsikan *dzakar* (alat kelamin laki-laki).

Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi alat kelamin laki-laki, maka ia boleh melakukan operasi dan menutup lubang vaginanya sehingga alat kelamin laki-laki yang dimilikinya bisa berfungsi secara sempurna dan identitasnya sebagai laki-laki menjadi jelas. Ia dilarang membuang alat kelamin laki-lakinya agar memiliki kelamin wanita dan beralih sebagai wanita, sedangkan di bagian dalam kelaminnya tidak terdapat rahim dan ovarium. Hal ini dilarang oleh Islam karena menentang kelamin yang dominan yang telah ditetapkan oleh ahli medis.

3.2 Pembahasan

Seorang banci (*khunṣa*) dalam kewarisan Islam tetap akan mendapat hak-hak kewarisan mereka. Namun proses ini harus meliputi beberapa langkah kongkrit yang mengarah pada kejelasan alat kelaminnya. Kejelasan alat kelamin yang dimiliki merupakan syarat standar dalam penentuan saham mereka sebab dengan jenis kelaminlah saham-saham dalam kewarisan Islam akan dibagikan. Faktor jenis kelamin sangat jelas pengaruhnya dalam pembagian kewarisan seorang *khunṣa* sebab jenis kelamin memegang peranan besar dalam penentuan besar kecilnya mereka. Sebagai gambaran dapat diperhatikan pada bagian-bagian ahli waris yang tertera dalam *furūdul muqaddarah* dalam QS. Al-Nisa (4): 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ

رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَّةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ
 مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Secara tegas bagian-bagian ahli waris diurai dalam ayat ini berdasarkan kedekatan dengan pewaris dan mempertimbangkan jenis kelamin mereka. Seorang suami akan berbeda bagiannya dengan isteri yang ditinggal oleh pewaris. Ayat ini juga secara spesifik menguraikan sebab kewarisan dari dua unsur; pertama unsur perkawinan dan unsur kekerabatan. Kedua unsur ini dikaitkan pula dengan jenis kelamin yang dimiliki oleh ahli waris. Sekali lagi pencantuman sebab-sebab kewarisan pada ayat ini tetap konsisten pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan tidak memberi peluang sedikitpun kepada banci (*khunṣa*) untuk memiliki harta warisan.

Kebuntuan terhadap porsi warisan banci (*khunṣa*) dijelaskan oleh fukaha dengan memberi mereka porsi tertentu kepada mereka secara menggantung. Maksudnya, porsi kewarisan terhadap banci (*khunṣa*) diberikan kepada mereka dalam bentuk separuh, menunggu sampai kemudian ada kejelasan terhadap status jenis kelamin yang

bersangkutan. Secara ringkas pendapat fukaha terhadap porsi kewarisan banci (*khunṣa*) dapat dilihat sebagai berikut, Menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, banci (*khunṣa*) *musykil* mendapat bahagian terkecil dari dua perkiraan antara bagian kewarisan laki-laki dan perempuan, dari sisa porsi yang diberikan kepada ahli waris lain. Golongan Syafi'iyah, Abu Daud, memberikan porsi kepada banci (*khunṣa*) berdasarkan perhitungan terkecil, sisa porsi mereka ditangguhkan sambil menunggu dan mengadakan penelitian jenis banci (*khunṣa*) guna diselesaikan secara musyawarah mufakat. Menurut golongan Malikiyah, Syi'ah, memberikan banci (*khunṣa*) separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan.

Pendapat fukaha telah mengatur bagian terhadap banci (*khunṣa*) dengan memberi mereka separuh bagian laki-laki dan perempuan, memberi kejelasan hukum sementara sambil menunggu penelitian terhadap jenis kelamin pasti mereka.

Fukaha telah pula menyinggung peluang timbulnya banci (*khunṣa*) *musykil* dalam garis keturunan meliputi: Garis keturunan anak ke bawah; meliputi anak, cucu dan seterusnya, Garis kesaudaraan meliputi; saudara, ponaka (anak dari saudara), Garis kepamanan meliputi; paman dan akan paman (sepupu) Garis perbudakan. Berikut tatacara penyelesaian kasus banci (*khunṣa*) *musykil* dalam urusan kewarisan berdasarkan simpulan pendapat fukaha:

- 3.2.1 Upaya pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara mencari tahu kejelasan jenis kelamin dari banci (*khunṣa*) *musykil* tersebut dari proses berkemih mereka. Jika ternyata banci (*khunṣa*) *musykil* berkemih dengan menggunakan organ kelamin laki-laki maka ia dihukumi sebagai laki-laki dan begitupula sebaliknya.
- 3.2.2 Meneliti ciri kedewasaannya (tentu ini membutuhkan waktu) yang mungkin akan mengidentifikasi ciri kedewasaan seorang laki-laki ataupun perempuan. Ciri-ciri ini dapat berupa tumbuhnya kumis dan jenggot bagi laki-laki dan buah dada yang membesar bagi perempuan.
- 3.2.3 Jika dua proses di atas mengalami kebuntuan, maka pendapat fukaha tentang penentuan bagian lebih kecil dari ahli waris laki-laki dan perempuan segera diimplementasikan seraya menunggu kejelasan jenis kelamin mereka.

Menetapkan kewarisan terhadap *transgender* ini yaitu dengan menurut kelamin semula sebelum ia melakukan operasi kelamin. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika orang ingin melakukan operasi kelamin itu sebab lingkungan yang begitu mendukung

untuk melakukan hal demikian. Penyebab-penyebab kelainan kelamin yang berakibat pada masalah psikologis transeksual atau transgender ini adalah diakibatkan karena ketidaksikronan atau tidak paralel ketika terjadi proses pembentukan sel-sel dan segalanya saat kehamilan dengan hasilnya ketika bayi itu dilahirkan. Hal ini juga melanggar tentang kodrat yang telah Allah tentukan, karena setiap Allah menciptakan sesuatu pasti mempunyai hikmah di dalamnya begitu pula dengan kelamin yang kita terima sejak kita lahir. Perbuatan ini sangat bertentangan dalam islam . Sabda Rasulullah SAW dalam hadis shahih muslim;

تَاهَبَشْتُمْ لَوِءَاسْنَابِلِاجْرَلَا نَمَنْ يَهَبَشْتُمْ لَمْ يَدْعُ إِلَهُ إِلَّا صِدِّيقُ اللَّهِ وَلَوْ سَرَّ نَعْدُ،
مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Rasulullah SAW melaknat kepada para Laki-laki yang menyerupai wanita dan Wanita yang menyerupai laki-laki”

Maka penetapan kewarisan bagi seseorang yang memiliki kelamin normal dan ingin menggantikan kelaminnya menjadi lawan jenisnya baik dari laki-laki maupun perempuan begitu pula sebaliknya maka penetapan kewarisannya kembali dengan kelamin sebelum ia melakukan operasi. Hal ini sesuai dengan kaidah asy-syakhsiyah bahwa asal itu akan kembali dengan semula”, bagaimana pun bentuk keberadaannya.

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Maka dengan beberapa keterangan serta dengan adanya landasan hukum terhadap penetapan kewarisan bagi orang yang melakukan operasi kelamin atau *transgender* ini, maka sudah cukup jelas bahwa penetapan kewarisan bagi *transgender* ini sesuai dengan kelamin sebelum ia melakukan operasi pergantian kelamin atau kembali kepada kelamin semula.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari penelitian serta penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : *Transgender* adalah orang yang mengidentifikasi karakter atau sifatnya berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Penetapan kewarisan terhadap Transgender dalam tinjauan hukum islam yang dilakukan oleh seseorang yang nmiliki kelamin normal ialah berdasarkan kelamin semula sebelum ia melakukan Transgender.

Penetapan kewarisan terhadap perbaikan penyempurnaan serta pembuangan salah satu kelamin adalah berdasarkan kelamin setelah ia melakukan Transgender. Penetapan terhadap penyempurnaan dan pembuangan salah satu kelamin ini berdasarkan kelamin yang dominan di antara kedua dan hal ini berdasarkan penetapan hukum pengadilan dan ahli medis yang memahami tentang kelamin yang cocok terhadap orang tersebut sehingga mendapatkan penetapan yang jelas terhadap status orang tersebut.

4.2 Saran

Bagi Masyarakat, Tindakan terhadap semaraknya Transgender ini dikalangan hidup bermasyarakat, baik bermula dari Banci, Waria, Gay, dan sampai kepada operasi kelamin (Transgender) maka masyarakat harus menjaga lingkungan dan lebih mengatur pola hidup terhadap lingkungan dan pergaulan. Karena pergaulan yang berlebihan akan menimbulkan efek yang fatal terhadap tindakan di luar kodratnya sehingga pergaulan mudah menyebar dengan yang masih tabu terhadap transgender ini. Penelitian ini bertujuan untuk menghimbau bahwa pentingnya status kelamin seseorang dalam hal ibadah muamalah dan kewarisan. Bagi Ahli medis, Bagi ahli medis yang akan melakukan operasi pergantian ataupun penyempurnaan alat kelamin harus meyakinkan terlebih dahulu kepada pasien sebelum tindakan dimulai karena ini bersifat permanen sekali di rubah tidak akan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemah

Gibtiah, *Study Perbandingan Tentang Khunsa Transseksual dan Transgender* (Palembang: Rafah Press, 2012), hlm. 11

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 7

Mustofa Bisri, *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), Hal. 45

Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 3-6

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54 /Pdt.P/2015/PNByl.

Suwandi, "Literasi Abu-Abu Kepustakaan", 2017. Jurnal Iqra' Volume 11 No. 11

Fatma Riska and others, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran', 2019. SemanTECH (2019), 316–31.

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama 2013), hlm. 17

- Gibtiah, *Fiqh Kotemporer* (Palembang: Rafah Press), hlm. 269-270
- Sayyid Ahmad, *Islam Bicara Soal Sek, Percintaan dan Rumah Tangga* (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), hlm. 352-356
- Edward Brace, *Penuntun Populer Bahasa Kedokteran* (Bandung: Angkasa, 1984) hlm. 344
- Ahmad Rofiq *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 172
- Luis Ma' luf al-Yassu' I, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa-Al-A' lam*, Beirut: Dar el-Masyreeq, 1975, hlm. 197.
- Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid: a modern Arabic-English Dictionary*, Lebanon: Dar Ilm lilmalayin, 1993, hlm., 525.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm., 164.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 5, Penerjemah Abdurrahman, dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2009. hlm. 640
- Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hlm. 139
- Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hlm. 140
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. 10 (Bandung: al-Ma'arif, 1975), h. 484. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam*, hlm. 13.
- Faturrahman. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1975. hlm. 83
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 15
- Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar* (Semarang: CV. Asy-Siafa, 1994), hlm. 351-352
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 19
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1
- Ma' ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 571
- Muhibuddin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 136.
- Suhrawardi K. Lubis Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 71-72.
- HR Al-bukhari dalam Shahihnya, no.5885, dari jalur 'Ikrimah pula
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 282
- Abd al-Wahhab Khallaf, *Maṣadir al-Tashrī' al-Islāmī fī Ma Lā Nassa fī ha*, 151